



KATALOG PROGRAM ACEH



- 2 | Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Gampong (LABKG)
- 4 | Sistem Informasi Gampong (SIGAP)
- 6 | Keperantaraan Pasar di Kabupaten Aceh Barat
- 8 | Dana Insentif Pembinaan Kampung (DEPIK) di Kabupaten Bener Meriah
- 10 | Insentif Kecamatan
- 12 | Konsorsium Perguruan Tinggi untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh
- 14 | Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong Terpadu (PKAG Terpadu)—Klinik Gampong
- 16 | Rumah Aspirasi dan Pengaduan Tuha Peut Gampong di Kabupaten Aceh Barat

KATALOG PROGRAM
ACEH

Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Gampong (LABKG)

Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong mendekatkan layanan administrasi kependudukan khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan.



Inisiatif LABKG dipicu oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan kapasitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam memperluas jangkauan layanan adminduk. Padahal, dokumen kependudukan sangat dibutuhkan terutama oleh masyarakat miskin dan rentan di perdesaan atau wilayah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal).

Sejak tahun 2017, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh bersama KOMPAK menggagas model LABKG melalui peran Petugas Registrasi Gampong (PRG) di Kabupaten Aceh Barat, Bener Meriah, dan Bireuen. LABKG menjadi model layanan adminduk, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengolahan data kependudukan (UU Nomor 23 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan). Saat ini, sebanyak 15 kabupaten/kota mengadopsi model LABKG yang difasilitasi oleh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

KOMPONEN PROGRAM



Regulasi pemda



Pembinaan dan pengawasan



APB Gampong/Kecamatan/
Kabupaten



Pelaporan penyelenggaraan



Kerja sama dengan
kementerian dan lembaga



Pemantauan dan evaluasi

TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM

- 1 **Pemetaan masalah** dan penyusunan model
- 2 **Inisiasi pembentukan PRG** dan penyusunan SOP
- 3 **Pengangkatan PRG** melalui SK yang diterbitkan oleh kepala desa/keuchik
- 4 **Pelatihan** (peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan gampong)
- 5 **Uji coba model** layanan berjenjang
- 6 **Penyusunan peraturan**
- 7 **Sosialisasi**
- 8 **Asistensi penyusunan** rencana kerja dan anggaran
- 9 **Perluasan**

DAMPAK



Meningkatnya **kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun di Kabupaten Bireuen** dari 43% pada 2017 menjadi 95% pada Oktober 2021.



Meningkatnya **kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun di Kabupaten Bener Meriah** dari 85% pada 2018 menjadi 94% pada Juli 2021.



Meningkatnya **kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun di Kabupaten Aceh Barat** dari 89% pada 2020 menjadi 94% pada September 2021.



LABKG berkontribusi meningkatkan **kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun di Aceh** menjadi 92% pada 2021.



Tersedia 18 orang tenaga terlatih untuk memfasilitasi penguatan kabupaten/kota guna penerapan model LABKG.



Sebanyak 4.462 PRG terlatih telah tersedia di 3.956 gampong yang menyelenggarakan layanan adminduk melalui LABKG.

"LABKG yang dilakukan melalui PRG berkontribusi mewujudkan Aceh tuntas adminduk. Pada 2021 ini, capaian kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun sudah mencapai 92%. Data kependudukan yang akurat akan membantu Pemerintah Aceh merencanakan program pembangunan yang lebih tepat sasaran," **Drs. T. Syarbaini, M.Si.- Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.**

Sekarang warga yang mau menerima tawaran bantuan, saya minta untuk melengkapi dokumen kependudukan sehingga dapat dengan mudah mengakses Program Keluarga Harapan atau PKH dari pemerintah," **Uswatun Khairat - PRG Gampong Blang Kuta Dua Meunasah, Kabupaten Bireuen.**

Tertarik melaksanakan program **LABKG** di kabupaten anda?
Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

Drs. T. Syarbaini, M.Si.
Kepala Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh
Telp: 0811-6884-55

Mimi Novita, A.KS., M.Si.
Kepala Bidang Kelembagaan, Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh
Telp: 0853-2153-7512

Sistem Informasi Gampong (SIGAP)

SIGAP mendukung ACEH SIAT melalui sistem pengelolaan satu data dan menyediakan informasi kepada publik untuk mendukung pembangunan dan pelayanan yang berkualitas.



Sistem Informasi Gampong (SIGAP) dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh bersama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dengan dukungan KOMPAK. Pengembangan aplikasi ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh membangun Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT). Aplikasi SIGAP digunakan aparatur gampong di seluruh Aceh sebagai basis data dan informasi yang kemudian dapat digunakan sebagai basis perencanaan dan penganggaran guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di gampong.



SIGAP berisi informasi, seperti data kependudukan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan data Sistem Informasi Pembangunan Desa (SIPEDE), perencanaan anggaran, keuangan, dan informasi penting lainnya. Data yang terekam di tingkat gampong ini teragregasi sampai kecamatan, kabupaten, hingga provinsi.

KOMPONEN PROGRAM



Software (aplikasi berbasis web)



Sistem dan prosedur (Panduan Penggunaan Aplikasi SIGAP 1.5.7, SOP dan MoU Pengelolaan Aplikasi SIGAP)



Regulasi (Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Gampong)



Tenaga pelatih dan layanan bantuan (*helpdesk*)



Anggaran (APBD Provinsi, APBDK dan APBG)

TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM

- 1 **Penyusunan kebijakan** di tingkat kabupaten
- 2 **Pembentukan *helpdesk*** dan pelatihannya
- 3 **Pelatihan gampong**
- 4 **Pendaftaran *user* gampong**
- 5 **Perluasan penggunaan aplikasi SIGAP** ke gampong, kecamatan dan kabupaten lainnya
- 6 **Pemantauan dan evaluasi**

DAMPAK



Tersedianya 130 orang tenaga pelatih SIGAP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.



Tersedianya 75 orang pengelola/Tim Helpdesk SIGAP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.



Sebanyak 109 gampong di 25 kecamatan dari 6 kabupaten/kota di Aceh telah menerapkan aplikasi SIGAP.



Tersedianya 1.579 operator SIGAP di 109 gampong.

“Sistem Informasi Gampong bermanfaat bagi Pemerintah Aceh untuk mengelola data kependudukan, perencanaan dan penganggaran, pembangunan serta pemberdayaan gampong. Sistem ini juga mendukung terwujudnya kebijakan Satu Data dan Sistem Informasi Aceh Terpadu atau SIAT,” **Dr. Ir.Zulkifli, M.Si. - Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh.**

“Melalui dukungan aplikasi SIGAP, pemerintah gampong semakin mudah menyusun perencanaan dan penganggaran gampong karena telah tersedia data yang akurat dan terbaru dalam aplikasi SIGAP. Selain itu, proses surat-menyurat juga semakin mudah,” **Rusli Haji - Keuchik Gampong Gunong Pulo, Kabupaten Aceh Barat.**

Tertarik melaksanakan program SIGAP di kabupaten anda?

Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

Drs. Wardana, M.Si.

Kepala Bidang Pengembangan Kawasan, Sumber Daya Alam, dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh

Telp: 0651 - 26324

Hendri Dermawan, S.Kom.

Kepala Bidang Layanan *E-Government* Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (DISKOMINSA) Aceh

Telp: 0651 - 22221

Keperantaraan Pasar di Kabupaten Aceh Barat

Keperantaraan Pasar merupakan pendekatan yang bertujuan mendekatkan pelaku usaha dengan pasar, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan kelompok usaha.



Pada 2016, Kecamatan Arongan Lambalek adalah salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Kabupaten Aceh Barat. Pada 2017, KOMPAK bersama UIN Ar Raniry menginisiasi pelatihan membuat kerajinan dari anyaman eceng gondok kepada lebih dari 100 perempuan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Produktif (KUP) melalui program KKN Tematik Universitas Membangun Desa (UMD). Kegiatan ini bertujuan memberikan alternatif mata pencaharian untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun saat itu, produk kerajinan eceng gondok kelompok ini belum mampu menembus pasar yang lebih luas.



Pada 2018, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama KOMPAK mengujicobakan model Keperantaraan Pasar dengan melibatkan para pemangku kepentingan sehingga produk kerajinan eceng gondok dapat memenuhi standar kualitas dan permintaan pasar.

KOMPONEN PROGRAM



Kebijakan - penetapan Kecamatan Arongan Lambalek sebagai Sentra Kerajinan Eceng Gondok



Anggaran dan pembiayaan - APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APB Desa, Bank Syariah Indonesia (pinjaman usaha), Bank Aceh Syariah (*Corporate Social Responsibility*)



Pihak Pendukung - Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh, Dinas Perindagkop Aceh Barat, DPMG Aceh Barat, Pemerintah Gampong Gunong Pulo, Hotel Hermes Banda Aceh, Sarinah, dan perbankan.



Kelompok usaha dampingan - Kelompok EG Craft dengan jumlah pengrajin sekitar 50 orang (mayoritas perempuan)

TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM

- 1 **Riset komoditas unggulan** untuk mengidentifikasi produk strategis, penerima manfaat, persoalan yang dihadapi kelompok usaha serta aktor-aktor pendukung potensial.
- 2 **Perencanaan intervensi** untuk mencari dan menentukan solusi serta merancang intervensi rinci.
- 3 **Implementasi dan pengukuran hasil:** menjalankan rencana intervensi, memantau dan melakukan pengukuran atas implementasi.



DAMPAK



Meningkatnya jumlah produk anyaman dan nilai penjualannya selama tahun 2020 dan 2021.

	2018	2020	2021 (s.d Oktober)
Jumlah Produk	315 buah	3.120 buah	1.379 buah
Nilai Penjualan	Rp15,7 juta	Rp143,1 juta	Rp78,3 juta



Meningkatnya jumlah pengrajin EG Craft dari 10 orang pada akhir 2018 menjadi 50 orang pada akhir 2021.



Terdapat beberapa **pembeli/pemesan reguler yang berasal dari Aceh, Sumatera Utara dan Yogyakarta dengan tujuan akhir konsumen yang berada di luar negeri.**



EG Craft juga telah memperluas channel pemasarannya melalui Instagram dan salah satu *e-commerce* terbesar di Indonesia, Shopee.



Sejak akhir 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Barat membangun kembali peran BUMG untuk **menjadi wadah bagi > 20 pengrajin tambahan untuk memasok produk anyaman kepada Kelompok EG Craft.**

"Model Keperantaraan Pasar terbukti mampu berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan di Aceh Barat. Para pengrajin eceng gondok di Gampong Kubu mayoritas berasal dari keluarga miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Saat ini mereka tidak lagi sepenuhnya menggantungkan diri dari bantuan sosial pemerintah, namun mampu mandiri memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berkat hasil penjualan kerajinan eceng gondok yang semakin meningkat setiap tahunnya," **H. Ramli M.S. - Bupati Aceh Barat.**

"Sejak menggunakan inovasi Keperantaraan Pasar, penjualan kami meningkat drastis. Produk-produk kami sudah dipasarkan ke luar negeri. Sebelum didampingi KOMPAK penjualan kami setahun hanya sekitar Rp15 Juta. Sekarang, penjualan kami bisa mencapai Rp143 Juta," **Cut Afni - Koordinator Kelompok EG Craft.**

Tertarik melaksanakan program penguatan **Keperantaraan Pasar** di kabupaten anda?

Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

Husni Yulham, S.Pi., M.I.L.

Kepala Bidang Ekonomi, Bappeda Aceh Barat
Telp: 0822-7663-5122

Jani Janan, S.E., Ak., M.Si.

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Aceh Barat
Telp: 0812-6904-100

Husensyah, S.Pd., M.Pd.

Kepala Bidang UKM, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Aceh Barat
Telp: 0813-6037-8384

Dana Insentif Pembinaan Kampung (DEPIK) di Kabupaten Bener Meriah

*Strategi inovatif pendorong
perbaikan tata kelola pemerintahan
kampung.*



Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) menginisiasi model penilaian kinerja gampong dengan memberi insentif kepada desa (kampung) yang dinilai berkinerja baik berdasarkan kategori dan kriteria yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Dana Insentif Pembinaan Kampung. Model penilaian ini dinamakan Insentif Kampung atau DEPIK.

Tujuan model penilaian kinerja kampung ini adalah

1. meningkatkan kinerja kampung dalam mengelola tata pemerintahan dan pelayanan;
2. mendukung sinergi pencapaian kinerja pembangunan kabupaten yang sensitif gender dan inklusif;
3. memaksimalkan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk mendukung pembangunan kampung.
4. membangun kapasitas pemerintah kabupaten agar dapat melakukan penilaian alokasi kinerja dalam Dana Desa (DD).
5. mengapresiasi kinerja pemerintah kampung.

KOMPONEN PROGRAM



Peraturan Bupati



Petunjuk teknis penilaian kinerja kampung



Surat Keputusan Bupati tentang tim penilaian kinerja kampung



Anggaran tim penilai



Tim penilai kinerja kampung



Anggaran insentif bagi kampung (baik melalui APBD dan/atau APBN)



Kriteria utama dan kategori kinerja penilaian

TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM

- 1 Pembentukan tim** untuk menyusun **peraturan bupati**
- 2 Sosialisasi** peraturan bupati
- Pembentukan **Tim Penilai Kinerja Kampung**
- Peningkatan kapasitas** Tim Penilai Kinerja Kampung
- Penilaian kinerja kampung** (kunjungan ke lapangan, verifikasi indikator kinerja)
- Penetapan kampung penerima insentif** melalui Surat Keputusan (SK) Bupati
- Penyaluran dana insentif** kepada kampung
- Evaluasi proses penilaian** untuk tahun berikutnya

DAMPAK



Pada 2021, **sebanyak 41 gampong di 7 kecamatan berhasil memenuhi prasyarat penilaian kinerja kampung.**



23 dari 41 gampong yang memenuhi standar kategori kinerja mendapat dana insentif kampung.



Kategori Kinerja Lingkungan dan Kebersihan diadopsi menjadi salah satu indikator dalam penilaian Program Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) yang digagas oleh The Asia Foundation (TAF) bersama Ecological Fiscal Transfer (EFT).



Sebanyak 63 gampong di Kecamatan Bukit dan Pintu Rime Gayo menyelesaikan musyawarah Pembangunan kampung untuk TA 2022 pada bulan Juni 2021 dan 6 gampong telah mengesahkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kampung TA 2022 pada bulan Oktober 2021.

“Diharapkan dengan inovasi “DEPIK” ini dapat memancing pemerintah kampung untuk lebih serius dalam pengelolaan pemerintahannya agar lebih baik dan profesional,” Sarkawi - Bupati Bener Meriah.

“Penilaian kinerja kampung ini dapat mendorong kampung berlomba-lomba meningkatkan kinerja, sehingga pembangunan kampung di masa depan benar-benar menjadi kenyataan, yakni membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu desa,” Drs. Suarman, M.M. - Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Bener Meriah.

Tertarik menginisiasi **DEPIK** di kabupaten anda?

Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

Khairun Aksa, S.E., M.M.

Kepala Bappeda Bener Meriah
Telp: 0852-9709-58000

Drs. Suarman, M.M.

Kepala DPMK Kabupaten Bener Meriah
Telp: 0813-6003-5188

M. Saukani, S.T.

Kepala Bidang Pemerintahan, DPMK
Kabupaten Bener Meriah
Telp: 0852-7570-0146

Insentif Kecamatan

Model inovatif untuk mendorong implementasi kewenangan kecamatan.

Insentif Kecamatan adalah model penilaian kinerja kecamatan secara sistematis. Model ini menilai capaian dan kinerja kecamatan khususnya dalam mengimplementasikan kewenangan atributif dan delegatif. Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Pemerintah Aceh mendorong model penilaian kinerja kecamatan supaya kecamatan mampu menjalankan kewenangan yang dimilikinya terutama terkait pelayanan dasar dengan baik. Penilaian kinerja dilakukan merujuk pada beberapa indikator.



Di Aceh ada indikator khusus yang masuk dalam penilaian kinerja kecamatan antara lain tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial, penerapan syariat Islam dan Program Bersih, Rapi, Estetis, dan Hijau (BEREH). Tim penilai berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) seperti Biro Tapem, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Saat ini, Biro Tapem sedang melaksanakan uji coba model Insentif Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, Bireuen, dan Bener Meriah.

KOMPONEN PROGRAM



Regulasi



Pedoman Penilaian Kinerja Kecamatan



Tim Penilaian Kinerja Kecamatan



Anggaran



TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM

- 1** **Penyusunan regulasi dan instrumen** penilaian kinerja
- 2** **Uji coba pelaksanaan** penilaian kinerja kecamatan
- 3** **Pengembangan aplikasi** penilaian kinerja kecamatan
- 4** **Penyusunan pedoman** penilaian kinerja kecamatan
- 5** **Sosialisasi kebijakan** tentang penilaian kinerja kecamatan (tujuan, mekanisme, indikator penilaian, tim penilai dan *output*)
- 6** **Penilaian dokumen** (instrumen penilaian)
- 7** **Validasi** (penilaian lapangan)
- 8** **Penilaian** oleh tim penilai
- 9** **Penetapan hasil** penilaian

DAMPAK



Model penilaian kinerja kecamatan ini diharapkan **mampu meningkatkan**

- **elayanan kecamatan,**
- **koordinasi lintas sektor di kecamatan,**
- **implementasi kewenangan atributif dan delegatif** yang dimiliki kecamatan.



Biro Tata Pemerintahan **dapat menggunakan hasil penilaian kinerja kecamatan ini untuk menyusun program pembinaan kecamatan.**

"Melalui penilaian kinerja kecamatan diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja camat dan aparatur kecamatan dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk mendukung pelayanan berkualitas di tingkat kecamatan," **Drs. Syakir, M.Si. - Kepala Biro Tata Pemerintahan, Setda Aceh.**

"Penilaian kinerja terhadap kecamatan sangat berguna untuk mendorong peningkatan kinerja dan peran kecamatan dalam pelayanan serta koordinasi di tingkat kecamatan, khususnya dalam upaya mendukung kualitas pelayanan bagi masyarakat miskin dan rentan," **Mursyidi - Camat Samalanga, Kabupaten Bireuen.**

Tertarik menginisiasi **Dana Insentif Kecamatan** di kabupaten anda?

Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

Restu Andi Surya, SSTP., M.P.A

Kepala Bagian Penataan Daerah dan Perangkat Pemerintahan
Biro Tata Pemerintahan – Sekretariat Daerah Aceh
Telp: 0651 – 7551377

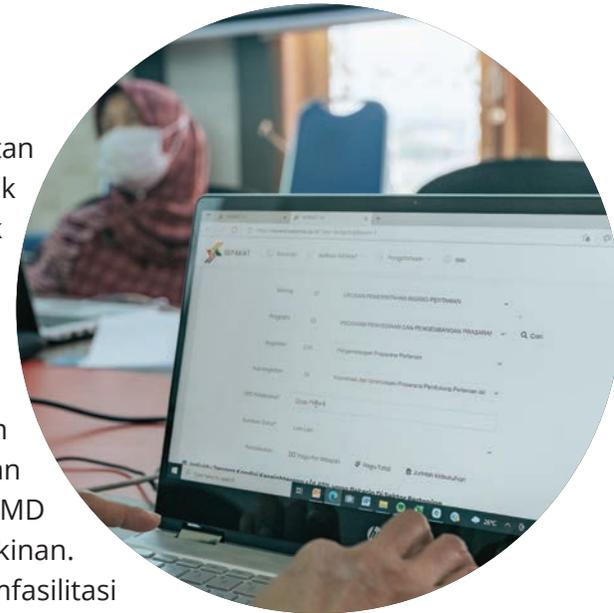
Mursyidi

Camat Samalanga, Kabupaten Bireuen
Telp: 0821-6622-9162

Konsorsium Perguruan Tinggi untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh

Inovasi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan di Aceh.

Konsorsium Perguruan Tinggi untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Konsorsium PK) dibentuk untuk menindaklanjuti keberhasilan KKN Tematik Universitas Membangun Desa (UMD) yang dilakukan UIN Ar Raniry di Aceh Barat pada 2017. Pemerintah Aceh menganggap KKN Tematik UMD mampu membawa perubahan karena kegiatannya disusun berdasarkan persoalan yang dihadapi masyarakat. Sementara Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Aceh secara khusus menilai KKN Tematik UMD dapat dilibatkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. TKP2K di bawah koordinasi Bappeda Aceh telah memfasilitasi pembentukan konsorsium percepatan penanggulangan kemiskinan melalui MoU antara Pemerintah Aceh dengan rektor/ketua/direktur perguruan tinggi se-Aceh yang beranggotakan 23 perguruan tinggi pada tanggal 4 Desember 2019.



KOMPONEN PROGRAM



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG)



TKP2K Aceh



Dinas Sosial



TKPK kabupaten/kota



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)



Perguruan Tinggi



Pusat Kajian di perguruan tinggi



TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM

- 1 **Perumusan *concept note*** keterlibatan perguruan tinggi
- 2 **Pembentukan konsorsium** perguruan tinggi
- 3 **Penyusunan MoU** antara Pemerintah Aceh (TKP2K) dengan 23 perguruan tinggi
- 4 **Perjanjian kerja sama**
- 5 **Pembentukan zonasi kerja**
- 6 **Pembentukan koordinator Konsorsium Perguruan Tinggi** untuk penanggulangan kemiskinan
- 7 **Koordinasi antar perguruan tinggi** di dalam satu zonasi
- 8 **Penyusunan payung hukum/regulasi**

DAMPAK



Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Barat (TKPK) bersama Universitas Teuku Umar dan STAIN Tengku Dirundeng berhasil menyusun naskah kebijakan menggunakan analisis SEPAKAT. Naskah kebijakan ini menjadi rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat untuk menyusun program penanggulangan kemiskinan TA 2022.



Konsorsium Perguruan Tinggi terlibat dalam Program Quick Wins Kabupaten Aceh Besar dan Bener Meriah Tahun 2021 berdasarkan SK Gubernur Aceh Nomor: 050/229/2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Khusus Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh.



Terdapat 23 dosen (9 perempuan, 14 laki-laki) yang terpilih dalam lingkup Konsorsium Perguruan Tinggi se-Aceh untuk program *scale-up* BUM Desa bersama DPMG Aceh.



Universitas Teuku Umar terpilih dalam program *matching fund* Kedaireka (Kedaulatan Indonesia dalam Reka Cipta) program dari Dikti Kemendikbud dalam penyusunan proposal pengembangan ekonomi binaan Universitas Teuku Umar.

“Pelibatan Konsorsium Perguruan Tinggi merupakan salah satu strategi Pemerintah Aceh dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan multi-pihak secara berkesinambungan,” **Dr. Hasrati Ali, S.E., M.M. - Sekretaris TKP2K Aceh.**

“Dengan adanya konsorsium, pengelolaan sumber daya manusia, pusat studi kebijakan, dosen dan mahasiswa di kampus dapat dikerahkan untuk mendukung pemerintah Aceh dalam upaya penanggulangan kemiskinan melibatkan multi-pihak secara komprehensif,” **Drs. Lukman Ibrahim, M.Pd. - Koordinator Konsorsium Perguruan Tinggi.**

Tertarik menginisiasi **Konsorsium Perguruan Tinggi untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan** di kabupaten anda? Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

Dr. Hasrati Ali, S.E., M.M.
Sekretaris TKP2K Aceh
Telp: 0812-6996-282

Prof. Eka Sri Mulyani, Ph.D.
Tim Perumus Konsorsium Perguruan Tinggi
Telp: 0813-6043-2655

Drs. Lukman Ibrahim, M.Pd.
Koordinator Konsorsium Perguruan Tinggi
Telp: 0811-6871-79

Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong Terpadu (PKAG Terpadu)—Klinik Gampong

Klinik Gampong memberdayakan aparatur gampong dan masyarakat.

Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong Terpadu (PKAG) adalah program pengembangan kapasitas pemerintah desa melalui pelatihan, bimbingan, koordinasi, konsultasi, serta berbagi informasi terutama dalam hal perencanaan dan pembangunan desa yang partisipatif dan inklusif.

Sebagai bagian dari PKAG, Klinik Gampong merupakan wadah yang menghimpun aparatur kecamatan dan wakil kelompok yang memiliki kepentingan dan/atau legitimasi atas gampong. Klinik Gampong dibentuk oleh camat sebagai upaya mengoptimalkan tugas dan fungsi kecamatan dalam mengoordinasikan penyelenggaraan layanan dasar di kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong.

Klinik Gampong membuka layanan dalam rangka pembinaan aparatur gampong. Pelayanan dimaksud berupa bimbingan teknis, koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi dan berbagi praktik baik antar pemangku kepentingan. Klinik Gampong turut memfasilitasi gampong dalam pelaksanaan pelatihan melalui pendekatan pembelajaran mandiri aparatur gampong (PbMAG), terutama dalam perencanaan, penganggaran, dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan gampong.

KOMPONEN PROGRAM



Penyusunan regulasi



Penguatan kelembagaan dan tata laksana organisasi di tingkat kabupaten, kecamatan dan gampong



Penyiapan pedoman, panduan dan modul pelatihan



Perencanaan dan penganggaran PKAG Terpadu



Peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik di tingkat kabupaten, kecamatan (PTPG) maupun gampong (PbMAG)



Pemantauan dan Evaluasi



TAHAPAN PROGRAM

- 1 Penyusunan peraturan bupati** tentang pembentukan Pembina Teknis Pemerintahan Gampong.
- 2 Pembentukan tim koordinasi dan pelaksana** PKAG Terpadu di tingkat kabupaten
- 3 Pembentukan Pembina Teknis Pemerintahan Gampong (PTPG)** di tingkat kecamatan
- 4 Peningkatan kapasitas** bagi Pembina Teknis Pemerintahan Gampong (PTPG)
- 5 Pembentukan Klinik Gampong** yang beranggotakan PTPG, aparatur kecamatan, tenaga pendamping profesional (P3MD) dan perwakilan lintas sektor
- 6 Peningkatan kapasitas tim pengelola** Klinik Gampong di tingkat kecamatan
- 7 Penyusunan program dan rencana kerja** Klinik Gampong
- 8 Penyelenggaraan pelayanan dan operasionalisasi** Klinik Gampong
- 9 Pemantauan dan evaluasi** (oleh camat dan tim Koordinasi PKAG Terpadu Kabupaten)

DAMPAK

- 1 Diterbitkannya Instruksi Gubernur Aceh No. 7/INSTR/2018 tentang Percepatan Penerapan PATEN dan Optimalisasi Peran Kecamatan Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong** (di dalamnya menginstruksikan seluruh bupati/wali kota untuk membentuk PTPG yang ditetapkan dengan SK bupati/wali kota).
- 2 Diterbitkannya Peraturan Gubernur Aceh No. 32 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong di Aceh.**
- 3 Diterbitkannya Peraturan Bupati Bireuen No. 14 Tahun 2020 tentang Pembina Teknis Pemerintahan Gampong Dalam Kabupaten Bireuen.**
- 4 Tersedianya 12 orang tenaga pelatih** di Kabupaten Bireuen, Bener Meriah dan Aceh Barat **untuk mendukung penerapan PKAG Terpadu.**
- 5 Sebanyak 4 dari 17 kecamatan** di Kabupaten Bireuen, Bener Meriah dan Aceh Barat **telah membentuk Klinik Gampong sebagai sarana pembinaan dan pengawasan pemerintahan Gampong melalui PKAG Terpadu.**
- 6 Tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)** terkait optimalisasi pelayanan Klinik Gampong **di 14 Kecamatan** di Kabupaten Bireuen, Bener Meriah dan Aceh Barat.
- 7 Tersedianya platform komunikasi, kolaborasi dan koordinasi** yang solid antar pemangku-kepentingan PKAG Terpadu.
- 8 Kecamatan menjadi lebih mudah dan optimal** dalam mengoordinasikan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong.
- 9 Pemerintah gampong mendapat kemudahan akses** untuk memperoleh peningkatan kapasitas pengelolaan tata pemerintahan desa secara berkelanjutan.
- 10 Tersedianya alat/media belajar untuk Klinik Gampong.**
- 11 Terlaksananya PbMAG untuk 41 gampong** di Kecamatan Simpang Mamplam dan Samalanga.

“Berkat tersedianya Klinik Gampong, kecamatan dapat lebih mudah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan gampong. Misalnya, pada saat gampong menyusun RKP Gampong atau APB Gampong, tim Klinik Gampong senantiasa menyusun jadwal bagi setiap gampong, khususnya bagi tim penyusun, untuk datang ke klinik. Di sana tim penyusun dibimbing secara berkelanjutan sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Alhamdulillah, sekarang dokumen rencana dan anggaran gampong menjadi lebih berkualitas,” Mursyidi - Camat Samalanga, Kabupaten Bireuen.

Tertarik menginisiasi **Klinik Gampong** di kabupaten anda?
Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

Janiswar, S. Sos.

Kepala Seksi Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Mukim dan Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh
Telp: 0651 – 26324, 26325

Mursyidi

Camat Samalanga, Kabupaten Bireuen
Telp: 0821-6622-9162

Rumah Aspirasi dan Pengaduan Tuha Peut Gampong di Kabupaten Aceh Barat

Rumah Aspirasi meningkatkan kapasitas Tuha Peut Gampong dalam menggali aspirasi dan pengaduan masyarakat untuk mendorong akuntabilitas sosial di gampong.



Rumah Aspirasi dan Pengaduan Tuha Peut Gampong merupakan sarana untuk menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi, termasuk pengaduan masyarakat gampong yang dikelola oleh Tuha Peut Gampong (Badan Permusyawaratan Desa atau BPD). Tujuan dari program ini adalah agar aspirasi/keluhan/pengaduan masyarakat gampong dapat dengan cepat dan tepat tertangani melalui mekanisme pemerintahan gampong yang transparan, partisipatif, akuntabel dan responsif gender.

Tuha Peut Gampong melalui Rumah Aspirasi mengumpulkan informasi/aspirasi dari kelompok masyarakat dengan cara mendatangi langsung masyarakat di rumah, menyelenggarakan pekan aspirasi, serta melalui aplikasi Whatsapp dan Sistem Informasi Desa (SID). Penyelesaian aspirasi/keluhan/pengaduan masyarakat dapat langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah gampong melalui Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKP Gampong), APB Gampong, dan RPJM Gampong. Tuha Peut Gampong dan pemerintah gampong menyalurkan aspirasi/keluhan/pengaduan yang berada di luar tanggung jawab gampong melalui supra gampong (kecamatan/kabupaten). Aspirasi masyarakat ini berkontribusi untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang inklusif dan sesuai kebutuhan masyarakat.



KOMPONEN PROGRAM



Regulasi (peraturan gampong, Perbup, Perda)



Pedoman pelaksanaan



Sumber daya manusia (Tuha Peut Gampong, aparat gampong dan masyarakat)



Panduan pemantauan dan evaluasi



Anggaran (APBD, APB Gampong)



Materi Rumah Aspirasi (video dan modul)

TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM

- 1 Pengaduan masyarakat yang diterima oleh sekretariat Rumah Aspirasi melalui berbagai sarana** (surat, SMS, WhatsApp, atau datang langsung) dicatat berdasarkan prinsip administrasi yang baik.
- 2 Pengaduan diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan pembidangan** yang ada di struktur Tuha Peut Gampong.
- 3 Proses pengelolaan aspirasi dan pengaduan** dimulai dengan mengumpulkan data di lapangan, mengkonfirmasi dan klarifikasi pihak-pihak yang terkait, serta melakukan investigasi untuk mendapatkan kejelasan permasalahan sebenarnya.
- 4 Tim pengelola Rumah Aspirasi melakukan pembahasan secara internal terhadap temuan di lapangan dan menindaklanjuti dengan pembahasan umum** dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait.
- 5 Hasil pembahasan dan kesepakatan didokumentasikan, kemudian disosialisasikan** kepada masyarakat dengan seefektif mungkin.
- 6 Penyelesaian pengaduan** dilakukan dalam beberapa cara, antara lain:
 - diselesaikan secara langsung;
 - dibahas dalam musyawarah gampong dan atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Gampong;
 - dikawal masuk dalam dokumen RPJM Gampong, RKP Gampong, dan APB Gampong;
 - dijadikan sebagai dasar perumusan “Maklumat Pelayanan”, baik di tingkat gampong maupun supra gampong;
 - Disalurkan ke supra gampong dan DPRK karena bukan kewenangan desa.

Bagi kelompok rentan, misalnya penyandang disabilitas, lansia, anak dan kebutuhan khusus lainnya, Rumah Aspirasi menyediakan mekanisme khusus, yaitu dibantu oleh Tim Rumah Aspirasi yang bertugas atau mendatangi langsung kelompok masyarakat tersebut.

DAMPAK

- 1 Sebanyak 9 rumah aspirasi warga dari 9 gampong di 3 kecamatan telah terbentuk** dan beroperasi.
- Sebanyak **14 orang Pembina Teknis Pemerintah Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek** mendapatkan pelatihan melalui Sekolah Anggaran Gampong.
- Sebanyak **71 orang Tuha Peut Gampong** mendapatkan pelatihan melalui Sekolah Anggaran Gampong.
- Sebanyak **1.665 aspirasi warga dari 5 gampong diterima dan ditindaklanjuti** oleh Tuha Peut Gampong melalui Musyawarah Penyusunan Perencanaan Gampong.
- Tersedia rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Gampong.**

“Rumah aspirasi Tuha Peut memberikan kemudahan bagi masyarakat gampong dalam menyalurkan aspirasi mereka tentang pembangunan gampong. Masyarakat juga diberikan kebebasan dalam menyalurkan aspirasi melalui mekanisme yang sudah disusun baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui kotak aspirasi yang sudah disediakan,” Amiruddin, S.Ag. - Kepala Bidang Pemerintahan Gampong, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat.

“Alhamdulillah, saya sangat berterimakasih kepada tuha peut dan pemerintah gampong. Awalnya saya menyampaikan aspirasi kepada tuha peut pada tahun 2020 untuk pembangunan WC dan tempat cuci di rumah saya. Tahun 2021 ini sudah dibangun melalui dana desa,” Sauyah - warga Gampong Alue Batee, Kecamatan Arongan Lambalek.

Tertarik melaksanakan **Program Rumah Aspirasi** di kabupaten anda?
Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

Amiruddin, S.Ag

Kepala Bidang Pemerintahan Gampong,
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
(DPMG) Kabupaten Aceh Barat
Telp: 0655-7552036

Ismail HS

Keuchik Gampong Alue Batee,
Kecamatan Arongan Lambalek
Telp: 0853-0655-0023

Muhammad Jamil

Pengurus Klinik Gampong
Kecamatan Arongan Lambalek
Telp: 0852-6250-4223

